



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, www.pt-bandung.go.id, info@pt-bandung.go.id

Nomor : 6330/KPT.W11-U/RA1.1/X/2023

Bandung, 30 Oktober 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

di-Majalengka

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka dimaksud untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Majalengka memperoleh nilai sebesar **74,9** atau **(BB) (Sangat Baik)**.
4. Nilai Tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6	21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21	22,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,8	10,8
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,5	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,9	74,9
			(BB) (Sangat Baik)	(BB) (Sangat Baik)



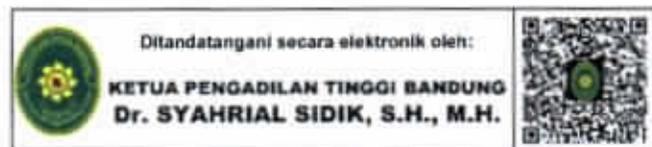
- UU ITE 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

NO	CATATAN
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen perencanaan kinerja belum dilengkapi dengan RKT dan Rencana Aksi tahun 2022
2.	Adanya Kekurangan dokumen reuiu IKU. Semua dokumen di atas harus sudah mendapatkan otorisasi satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap instansi.
3.	Belum menampilkan adanya pohon kinerja pada dokumen perencanaan jangka pendek RKT dan PKT
4.	Belum memuat analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).
5.	Belum menunjukkan pelaksanaan kinerja yang terjadwal dan terorganisasir dan tidak ada SOP untuk mendukung kinerja yang dicapai, dan Belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala(kegiatan dan jadwal telah ditentukan);
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum dilengkapi juknis tentang penyusunan RKA-KL dan SK Sekma tentang Penyusunan SAKIP, Belum terdapat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja internal yang mencakup SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja, SOP Pengumpulan dan kinerja, serta jadwal monev pengukuran kinerja sesuai dengan rencana aksi;
2.	Belum menampilkan hasil pengukuran kinerja (dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reuiu SOP, rapat tindaklanjut evaluasi kinerja) yang lalu sebagai dasar menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan; Belum dilengkapi dengan dilengkapi dengan LRA 2022 dan Nilai EIS 2022
3.	Belum adanya rekap tukin 3 bulan terakhir sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. dan menampilkan laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran;
4.	Belum menampilkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi);
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Belum terdapat Dokumen rapat capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan informasi dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, pencapaian keberhasilan kerja, perencanaan, perubahan budaya kerja organisasi
2.	Belum memuat analisis target dan realisasi tingkat nasional (<i>benchmark</i>) sebagai pembandingan;
3.	Belum menampilkan laporan kinerja/monitoring evaluasi yang disusun secara berkala per triwulan; dan
4.	Belum menampilkan hasil dokumen laporan kinerja yang reuiu oleh APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja menyajikan informasi andal, akurat, dan berkualitas sesuai dengan lampiran permenpan 53/2014;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum menampilkan SK Tim Evaluator SAKIP
2.	Belum menampilkan dokumen laporan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2022

NO	REKOMENDASI
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar melengkapi dengan RKT dan Rencana Aksi tahun 2022 pada Dokumen perencanaan kinerja
2.	Agar melengkapi Kekurangan dokumen reuiu IKU, semua dokumen di atas harus sudah mendapatkan otorisasi satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap instansi.
3.	Agar menampilkan adanya pohon kinerja pada dokumen perencanaan jangka pendek RKT dan PKT
4.	Agar memuat analisis perencanaan kinerja sehingga dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).
5.	Agar menyusun pelaksanaan kinerja yang terjadwal dan terorganisir dan merancang SOP untuk mendukung kinerja yang dicapai, dan melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala dengan sinkronisasi kegiatan dan jadwal telah ditentukan
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar melengkapi juknis tentang penyusunan RKA-KL dan SK Sekma tentang Penyusunan SAKIP, memuat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja internal yang mencakup SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja, SOP Pengumpulan dan kinerja, serta jadwal monev pengukuran kinerja sesuai dengan rencana aksi;
2.	Agar menampilkan hasil pengukuran kinerja (dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen reuiu SOP, rapat tindaklanjut evaluasi kinerja) yang lalu sebagai dasar menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan; dan melengkapi LRA 2022 dan Nilai EIS 2022
3.	Agar melakukan rekap tukin 3 bulan terakhir sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dan menampilkan laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran;
4.	Agar menampilkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi);
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar menampilkan dokumen rapat capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan informasi dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, pencapaian keberhasilan kerja, perencanaan, perubahan budaya kerja organisasi
2.	Agar memuat analisis target dan realisasi tingkat nasional (<i>benchmark</i>) sebagai pembanding;
3.	Agar menampilkan laporan kinerja/monitoring evaluasi yang disusun secara berkala per triwulan; dan
4.	Agar menampilkan hasil dokumen laporan kinerja yang reuiu oleh APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja menyajikan informasi andal, akurat, dan berkualitas sesuai dengan lampiran permenpan 53/2014;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar menampilkan SK Tim Evaluator SAKIP agar pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai standar, oleh SDM dan pendalaman yang memadai
2.	Agar menampilkan dokumen laporan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2022

Demikian hasil evaluasi Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka, adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Majalengka segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi, terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta.